

PENATAAN KELEMBAGAAN PENEGAK HUKUM PIDANA PEMILIHAN UMUM YANG EFEKTIF

Oleh
Muhamad Heldi
NIM. 2205040055

ABSTRAK

Kesenjangan antara jumlah temuan serta laporan mengenai tindak pidana pemilihan umum yang masuk dan kasus yang berhasil sampai ke tahap putusan pengadilan pada Pemilu 2019 dan 2024 menunjukkan adanya masalah mendasar dalam sistem koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menata kelembagaan penegak hukum pidana pemilihan umum yang efektif untuk menjawab ketidakefektifan yang ditimbulkan dalam mekanisme yang dijalankan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan pendekatan hukum normatif yang mencakup pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menggunakan teori kelembagaan dari Neil MacCormick dan Ota Weinberger sebagai pisau Analisa untuk menata kelembagaan penegak hukum pidana pemilu lewat indikator berupa struktur triadic. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yang hanya berfungsi sebagai wadah koordinasi, menghadapi tantangan besar akibat ketidaksepemahaman antar unsur penegak pidana pemilu karena ego sektoral yang tinggi sehingga hasil keluarnya putusan tindak pidana pemilu jauh dari jumlah laporan dan temuan yang masuk serta birokrasi dalam penyelesaian tindak pidana pemilu yang lama. Karena itu, penelitian ini merekomendasikan penataan kelembagaan dengan kewenangan yang terintegrasi, yaitu memperluas kewenangan penyelidikan kepada Bawaslu dengan mengharuskan Bawaslu membenahi keanggotaannya agar memiliki kompetensi di bidang hukum, serta memberikan kewenangan penyidikan dan penuntutan dalam satu lembaga yang berisi unsur Kepolisian sebagai penyidik pembantu dan Kejaksaan dalam proses penuntutan dengan sebutan Komisi Penegak Hukum Pidana Pemilu. Pembentukan Komisi Penegak Hukum Pidana Pemilu ini adalah suatu kebutuhan konstitusional yang mendesak untuk menjaga integritas pemilu dan memastikan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang mencerminkan kedaulatan rakyat dalam negara hukum yang demokratis

Kata Kunci: Penataan Kelembagaan, Tindak Pidana Pemilu, Efektif

**THE ESTABLISHMENT OF AN EFFECTIVE INSTITUTIONAL
FRAMEWORK FOR THE ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW
RELATING TO GENERAL ELECTIONS**

By
Muhamad Heldi
NIM. 2205040055

ABSTRACT

The disparity between the number of findings and reports regarding electoral offences received and the number of cases that successfully reached the court judgement stage in the 2019 and 2024 general elections indicates a fundamental problem within the coordination system of the Integrated Law Enforcement Centre. Therefore, this study aims to establish an effective institutional framework for the enforcement of electoral criminal law to address the inefficiencies arising from the mechanisms operated by the Integrated Law Enforcement Centre. This research was conducted using a normative legal approach, encompassing legislative and conceptual approaches, and utilising the institutional theory of Neil MacCormick and Ota Weinberger as an analytical framework to structure the institutional framework for electoral criminal law enforcement through a triadic structure. The research findings indicate that the Integrated Law Enforcement Centre, which functions solely as a coordinating body, faces significant challenges due to a lack of understanding amongst electoral criminal law enforcement agencies caused by high levels of sectoral ego; consequently, the number of rulings on electoral criminal offences is far lower than the number of reports and findings received, and the bureaucratic process for resolving such offences is protracted. Consequently, this study recommends an institutional framework with integrated powers, namely extending investigative powers to the Election Supervisory Agency whilst requiring Bawaslu to restructure its membership to ensure it possesses legal expertise, as well as granting investigative and prosecutorial powers to a single body comprising elements of the Police as assistant investigators and the Public Prosecutor's Office in the prosecution process, to be known as the Electoral Criminal Law Enforcement Commission. The establishment of this Electoral Criminal Law Enforcement Commission is an urgent constitutional necessity to safeguard the integrity of elections and ensure the principles of direct, universal, free, secret, honest and fair voting, which reflect the sovereignty of the people in a democratic state governed by the rule of law.

Keywords: Institutional restructuring, Electoral Offences, Effective